

**IMPLEMENTASI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN BERDASARKAN
INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP)
TAHUN 2020 DI MIN 1 BANDUNG**

**Implementation of Community Involvement in Improving the Quality
of Education Based on the 2020 Education Unit Accreditation
Instrument (IASP) at MIN 1 Bandung**

Ana Anisa & Mulyawan Safwandy Nugraha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ananisa18@gmail.com; mulyawan@uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 10, 2024	Jun 13, 2024	Jun 16, 2024	Jun 19, 2024

Abstract

Indonesia's education policy is closely linked to other public policies and can change if public policies change. Education requires community participation to produce an effective learning community. This research uses a qualitative approach with descriptive method located in MIN 1 Bandung. With the committee, some programs run smoothly, and socialization with students can be coordinated easily. The participation of the committee and other elements such as Polsek, Puskesmas, and local RT/RW received positive responses, especially with programs that involve interaction with the surrounding environment and habituation programs that create new habits in the school environment. Community participation or individual participation in the development of self, life, and the environment, which involves two-way interaction between the government and the community.

Keywords : Community involment; Implementation; Education quality; IASP

Abstrak : Kebijakan pendidikan Indonesia sangat terkait dengan kebijakan publik lainnya dan dapat berubah jika kebijakan publik berubah. Pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan komunitas pembelajaran yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berlokasi di MIN 1 Bandung. Dengan adanya komite, beberapa program berjalan lancar, dan sosialisasi dengan siswa dapat dikordinir dengan mudah. Partisipasi komite dan elemen lain seperti Polsek, Puskesmas, dan RT/RW setempat menerima tanggapan positif, terutama dengan adanya program yang melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar dan program pembiasaan yang menciptakan kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan individu dalam pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungan, yang melibatkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Pelibatan masyarakat; Implementasi; Kualitas Pendidikan; IASP

PENDAHULUAN

Kebijakan publik yang lainnya termasuk kebijakan agama, internasional, ekonomi, politik, dan lainnya, sangat terkait dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan Indonesia tidak dapat berdiri sendiri; kebijakan pendidik juga akan berubah jika kebijakan publik berubah. Bahkan dengan pergantian menteri, kebijakan pendidikannya pun akan berubah.

Di era *society* 5.0 yang mengakibatkan berbagai tantangan dan permasalahan sosial semakin kompleks dan komprehensif mengharuskan masyarakat untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan tersebut. Pendidikan menjadi center perubahan bersama masyarakat untuk menghasilkan komunitas pembelajaran dan pendorong pembelajaran yang menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran beserta media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi serta perkembangan kurikulum secara luas dengan memanfaatkan inovasi digital.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sama seperti hubungan sekolah dengan masyarakat, partisipasi masyarakat juga memiliki peranan yang krusial dalam setiap perkembangan sekolah. Karena pada hakikatnya sekolah bukan lembaga yang berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan partisipasi dalam masyarakat. Sehingga sekolah menjadi bagian yang integral dengan masyarakat. Penyangga utama dalam perjalanan pendidikan adalah masyarakat sekitar.

Fenomena yang dapat ditemui di lembaga pendidikan berkaitan dengan kontribusi masyarakat dalam pembuatan keputusan kebijakan pendidikan di antaranya keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat, ketidaksetaraan partisipasi masyarakat,

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, kurangnya komunikasi yang dilakukan sekolah dengan masyarakat serta kurangnya dana dan sumber daya yang memadai.

Permasalahan tersebut harus diatasi oleh setiap lembaga pendidikan melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, yang artinya semua berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Perlu adanya dorongan dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa partisipasinya dihargai dan ikut berperan andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Jika ditelaah secara berkelanjutan, maka setiap lembaga pendidikan perlu melibatkan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola proses manajerial pendidikan

Masyarakat memiliki partisipasi dalam mendukung proses pendidikan. Dampak dari partisipasi masyarakat tersebut dapat terlihat dari kualitas atau mutu pendidikannya. Jika partisipasi masyarakat tersebut dilakukan secara maksimal, maka akan memberikan kualitas pendidikan yang mumpuni pula. Dengan demikian pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program madrasah dan persepsi positif masyarakat terhadap madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau menggali temuan yang ada di lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan menggunakan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah implementasi pelibatan masyarakat MIN 1 Bandung sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan kepala madrasah dan komite. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan: (1) Menyiapkan instrumen pertanyaan sebagai pedoman wawancara; (2) Menganalisis data yang telah dikumpulkan; (3) melakukan pemetakan dan pemberian uraian singkat mengenai hasil temuan; dan (4) Menyimpulkan hasil temuan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi berasal dari bahasa Latin "*participation*" atau "*participationis*", yang berarti keterlibatan atau keterlibatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan partisipasi sebagai hal turut berperan serta atau terlibat dalam suatu hal. Partisipasi merupakan keikutsertaan untuk memberikan bantuan pada setiap program sesuai dengan keterampilan dari setiap individu, dan tanpa adanya pengorbanan terhadap kepentingan diri sendiri, guna mensukseskan program tersebut. Menurut Center, partisipasi diartikan *feed forward information and feedback information*. Partisipasi bisa didefinisikan seperti keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungan (Mikkelsen, 2003). Didasarkan pada definisi ini, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai jalan interalasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan konstruksi komunikasi antara pemangku kebijakan yaitu pemerintah dengan masyarakat (Rusdiana, 2015). Menurut Newstrom dan Davis, "keikutsertaan mental dan emosional orang dalam suatu keadaan kelompok yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab atas mereka" berarti bahwa keikutsertaan orang dalam suatu keadaan kelompok berkaitan dengan emosi dan mental (Newstrom & Davis, 1993). Partisipasi, atau keterlibatan, adalah konsep "meta" yang mewakili interaksi antara individu dan lingkungannya, bukan sebagai sifat individu yang menyerupai sifat (Korpershoek et al, 2020): Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan terdiri dari beberapa bentuk yaitu partisipasi finansial, material, akademik, kultural dan evaluatif (Fuady, 2022). Berikut penjelasannya

- a. Partisipasi finansial, berhubungan dengan pemberian dana sesuai dengan kemampuan dari masyarakatnya. Orang tua secara bersama-sama mampu menyokong dana yang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah, dalam artian dapat dipertanggungjawabkan guna kesuksesan pendidikan. Selanjutnya pemberian anggaran berupa beasiswa pendidikan dapat dilakukan oleh lembaga lainnya misalnya lembaga bisnis dan industri dapat membantu dengan menyisihkan anggarannya.
- b. Partisipasi material, berkaitan dengan pemberian sumbangan berupa bahan-bahan material bangunan untuk pembuatan atau penyempurnaan ruang dan tempat belajar, supaya kegiatan belajar dan pembelajaran berjalan dengan optimal. Maka masyarakat juga mendukung agar terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan efisien secara fisik.

- c. Partisipasi akademik, guna menciptakan pelaksanaan kegiatan akademik yang berkualitas, maka perlu adanya partisipasi masyarakat. Orang tua dan masyarakat dapat memberikan dukungan dengan membimbing dan mengawasi kegiatan belajar anaknya di rumah. Memberikan kesempatan untuk magang atau praktek dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah dengan pemerian fasilitas dan bimbingannya. Hasl tersebut dilakukan guna memberikan pengetahuan secara nyata bagi peserta didik di lapangan.
- d. Partisipasi kultural, berhubungan dengan pemberian perhatian masyarakat kepada pemeliharaan nilai budaya dan moral lingkungan sekitar sekolah, yang nantinya sekolah dapat menyesuaikan diri dengan buadaya sekitar.
- e. Partisipasi evaluasi, masyarakat harus terlibat dalam pengawasab dan kontrol penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan *feedback* dan peniaian kinerja lembaga pendidikan. Selanjutnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kurikulum sekolah dan memberikan saran supaya kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa

Partisipasi masyarakat secara umum adalah keterlibatan atau partisipasi seseorang yang dilakukan dalam bentuk perorangan atau kelompok dalam suatu kegiatan (.Ansharuddin & Sholihan, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu upaya untuk ikut serta dalam proses pendidikan (Nuryanto, 2019). Partisipasi masyarakat didefenisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan masalah dan keterampilan dalam masyarakat, penentuan dan pemilihan keputusan tentang solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan, pelaksanaan dalam cara untuk mengatasi masalah dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan dengan melakukan evaluasi (Yani, 2023).

Kebanyakan orang mengartikan interaksi antara sekolah dan masyarakat dalam artian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada pendidikan anak. Namun sebenarnya memiliki artian yang lebih luas dan mencakup berbagai bidang. Ada tiga kategori interaksi kolaborasi antara sekolah dan masyarakat: hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan instutisional (Fauziyati, 2018).

- a. Hubungan edukatif ialah jenis kolaborasi yang berkaitan dengan pengajaran siswa antara guru di sekolah dan orang tua di keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan prinsip atau bahkan perselisihan yang mampu menyebabkan anak bingung dalam pendirian dan perilakunya. Bentuk kerjasama

antara guru dan orang tua lainnya adalah mengajar anak tentang norma-norma sosial dan etika.

- b. Kemitraan budaya memerlukan upaya kolaboratif antara sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk saling membimbing dan mempromosikan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun tingkat kerja sama yang optimal antara sekolah dan masyarakat.. Kegiatan kurikulum sekolah, serta bahan ajar dan pendekatan pengajaran, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Hubungan institusional adalah jenis kolaborasi antara sekolah dan lembaga resmi lainnya meliputi lembaga swasta maupun pemerintah. Contoh jalinan ini termasuk sekolah, kepala pemerintah daerah, bahkan perusahaan nasional atau negara. Ini berkaitan dengan peningkatan dan peningkatan pendidikan secara keseluruhan.

Proses pengembangan pendidikan memerlukan kepedulian dari masyarakat, bukan seperti saat ini yang hanya memberikan bantuan material saja, akan tetapi seharusnya mampu meluangkan waktunya supaya mampu membantu lembaga pendidikan dengan memberikan konsep kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan (Bisri, 2020).

Komite sekolah atau madrasah merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan lembaga pendidikan. Komite ini adalah lembaga mandiri dan terdiri dari wali murid, komunitas sekolah yang peduli dengan pendidikan, dan masyarakat sekitar dan umum (Bisri, 2020). Komite sekolah/madrasah yaitu bagian dari sekolah yang memiliki sifat semi formal sebagai bentuk perwujudan keterlibatan orang tua dan masyarakat (Zamroni, 2007).

Masyarakat merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan untuk keberhasilan sekolah (Uno, 2010). Masyarakat tersebut memiliki konsep yang tidak terbatas dan kompleks yang mengakibatkan sekolah sulit untuk melakukan interaksi secara intensif. Untuk menyederhanakan konsep masyarakat, "perwakilan" digunakan dengan membentuk komite sekolah yang mempertimbangkan keragaman masyarakat (Uno, 2010).

Komite sekolah/madrasah berperan dan memiliki fungsi untuk mengembangkan mutu pendidikan di wilayah masing-masing, jika dewan komite sekolah/madrasah menjalankan perannya dengan baik maka akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sekolah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, komite sekolah/madrasah dituntut untuk menyusun

rencana program dan memastikan pengelolaan yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nurhasanah, 2021).

Menurut buku rujukan komite sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dibentuk dengan tiga tujuan:

- a. Mengumpulkan dan menyebarluaskan masukan dari masyarakat untuk membentuk kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah.
- b. Menumbuhkan keterlibatan dan akuntabilitas masyarakat dalam layanan dan administrasi sekolah.
- c. Membangun budaya akuntabilitas, demokrasi, dan transparansi di lembaga pendidikan untuk memastikan penyampaian layanan pendidikan yang berkualitas secara efektif (Departemen Agama RI, 2003).

Keberadaan komite sekolah/madrasah diharapkan mampu menampung harapan masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tugas dalam pelaksanaan pendidikan dan menghasilkan keadaan yang akuntabel, demokratis, dan transparan. Peningkatan partisipasi siswa dan masyarakat dalam proses pendidikan akan membantu sekolah menjadi lingkungan yang terbuka dan demokratis antara siswa, guru, staf, dan orang tua (Nurhasanah et al, 2017). Komite sekolah juga bertanggung jawab untuk menerima dan menganalisis ide-ide, kebutuhan, dan keperluan pendidikan yang berasal dari masyarakat dalam maupun luar sekolah (Febriana, 2020).

Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program Madrasah

Kepala atau Wakil Kepala Sekolah menjelaskan bahwa komite sekolah sangat terlibat dalam berbagai tahapan program sekolah. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam penyusunan rencana, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan program-program tersebut. Setiap bulan, diadakan rapat bersama komite sekolah untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan program yang sedang berjalan. Keterlibatan aktif komite ini memastikan bahwa semua program dapat dijalankan dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Komite sekolah menguraikan bahwa mereka terlibat dalam berbagai aspek kegiatan sekolah. Selain peran mereka dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah, mereka juga berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan tambahan. Beberapa kegiatan tersebut meliputi pembangunan DOM (panggung permanen), program P5 (Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan), Green House (pertanian urban di sekolah), pengelolaan kantin,

pembagian Program Indonesia Pintar (PIP), pengelolaan pojok baca, program MIN Bandung Berbagi (kegiatan sosial berbagi dengan sesama), Sanlat (Pesantren Kilat), Festival sekolah, dan program SADAR (Sadar akan kebersihan dengan memungut sampah di lingkungan masyarakat). Dengan beragamnya kegiatan ini, komite sekolah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengembangkan lingkungan pendidikan yang positif.

Persepsi Positif Masyarakat terhadap Madrasah

Menurut Kepala atau Wakil Kepala Sekolah, kehadiran komite sekolah berperan besar dalam kelancaran pelaksanaan berbagai program. Dengan adanya komite, proses sosialisasi dan komunikasi dengan wali murid menjadi lebih terstruktur dan efisien. Informasi dari sekolah dapat dengan cepat disampaikan melalui wali kelas kepada koordinator kelas, yang juga anggota komite. Sistem koordinasi ini mempermudah penyampaian informasi dan pelaksanaan program, sehingga mendukung kelancaran operasional sekolah.

Komite sekolah mencatat bahwa pelibatan mereka bersama beberapa elemen masyarakat seperti Polsek (Polisi Sektor), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan RT/RW setempat mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Program-program yang dirancang untuk melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar, seperti kegiatan sosial dan program pembiasaan, berhasil menciptakan kebiasaan baru yang positif di lingkungan sekolah. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antara sekolah dan komunitas sekitarnya.

KESIMPULAN

Kepala atau Wakil Kepala Sekolah menegaskan bahwa komite sekolah memainkan peran penting dalam setiap tahap program sekolah, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan adanya rapat bulanan bersama komite, perkembangan program selalu dievaluasi secara berkala, memastikan dukungan penuh dari masyarakat untuk keberhasilan setiap program. Komite sekolah juga terlibat dalam berbagai kegiatan tambahan seperti pembangunan DOM, program P5, Green House, pengelolaan kantin, pembagian PIP, pojok baca, MIN Bandung Berbagi, Sanlat, Festival, dan program SADAR. Partisipasi aktif komite ini menunjukkan komitmen kuat mereka dalam mendukung dan mengembangkan lingkungan pendidikan yang positif.

Kehadiran komite sekolah dinilai sangat membantu kelancaran berbagai program melalui koordinasi yang lebih terstruktur dan efisien dalam sosialisasi dan komunikasi dengan wali murid. Komite sekolah juga berkolaborasi dengan elemen masyarakat seperti Polsek, Puskesmas, dan RT/RW setempat, yang memberikan respon positif terhadap program-program yang melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antara sekolah dan komunitas, serta menciptakan kebiasaan baru yang positif di lingkungan sekolah. Bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, yang mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansharuddin, dan M Sholihan. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Kumalasa Sangkapura Bawean Gresik. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 20: 17.
- Bisri, Abdul Mukti. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1: 51–64. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>.
- Britha, Mikkelsen. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Rakyat.
- Departemen Agama RI. (2003). Pedoman Komite Sekolah.” Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Fauziyati, Wiwin Rifatul. ((2018). Strategi Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan menuju Generasi Maju Indonesia. *Qalamuna* 10, no. 1: 157–77.
- Febriana, Lilys. (2020). Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang. *Jurnal PAI Raden Patah* 1, no. 2: 161.
- Fuady, Syafrizal. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Marga Cinta Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (Tarbiyatul Misbah)* 15, no. 2: 155.
- Korpershoek, H., E. T. Canrinus, M. Fokkens-Bruinsma, dan H. de Boer. (2020). The relationships between school belonging and students’ motivational, social-emotional, behavioural, and academic outcomes in secondary education: a meta-analytic review. *Research Papers in Education* 35, no. 6: 643. <https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1615116>.
- Newstrom, J.W, dan K Davis. (1993). *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Nurhasanah, R, Bonita Bilqis, dan Ausia Ariana Putri. (2021). Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam MAPPESONA Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam.”

- Mappesona (Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam)* 3, no. 1: 22–33.
- Nuryanto, Sidik. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Kelas Inspirasi. *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 1, no. 2: 11–126.
<https://doi.org/10.21093/sajie.v1i2.1442>.
- Rusdiana. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Media, 2015.
- Uno, Hamzah B. (2010). *Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Yani, Ahmad. (2023). Otonomi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Dampak Terhadap Pendidikan Nasional” 7, no. 1: 543.
- Zamroni. (2007). *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.